

## Perempuan dan Kebangsaan

**Catatan Jurnal Perempuan**  
Perempuan dan Kebangsaan

### Artikel

Kebangkitan Para "Ibu Bangsa" Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia  
*Siti Utami Dewi Ningrum*

Perempuan dalam Film Indonesia Tentang "Indonesia Timur"  
*Meike Lusye Karolus*

Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan  
*Mutiah Amini*

Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017  
*Lelly Andriasanti*

Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme  
*Fitria Sari*

Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan  
*Ruth Indiah Rahayu dan Iqraa Runi Aprilia*

Diterbitkan oleh:

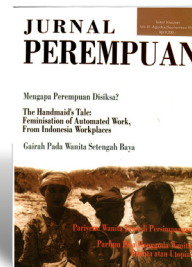


Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**  
**No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**

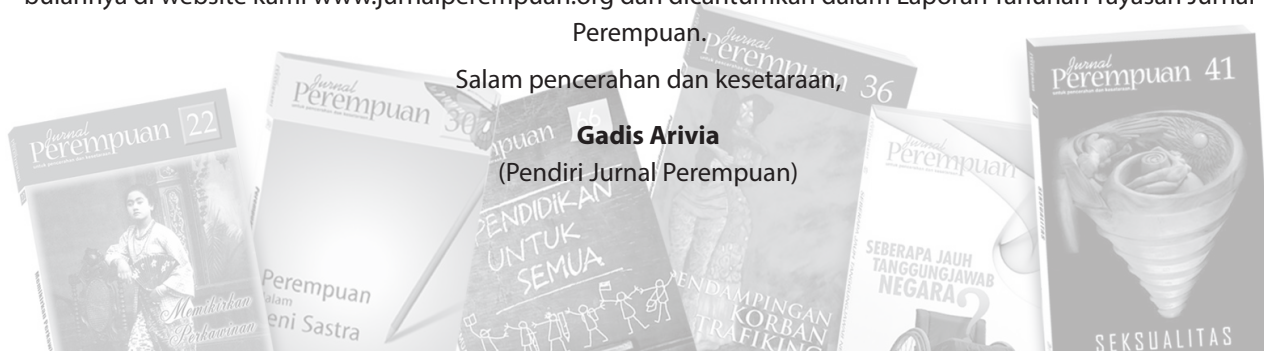
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)





ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR EKSEKUTIF**

Dr. Atnike Nova Sigi

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy, M.Si.

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigi, M.Sc. (Pascasarjana Diplomas, Universitas Paramadina)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

**REDAKSI**

Bella Sandiata, M.H.  
Iqraa Runi Aprilia

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Agustus 2018



## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebangsaan/Women and Nationalism .....	iii
--	-----

### Artikel / Articles

- Kebangkitan Para “Ibu Bangsa” Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia / *The Revival of the “Mothers of the Nation” from the Period of Anti Colonial Movement until the Independence of Indonesia* ..... 129-141  
Siti Utami Dewi Ningrum
- Perempuan dalam Film Indonesia Tentang “Indonesia Timur” / *Women in Indonesian Films about “Eastern Indonesia”* ..... 143-152  
Meike Lusye Karolus
- Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan / *Gender Bias in Historiography of Indonesia and the Writing of Women’s History* ..... 153-160  
Mutiah Amini
- Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 / *Ibuisms of Political Islam in the Election of Jakarta Governor in 2017* ..... 161-171  
Lelly Andriasanti
- Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme / *Negotiation and Autonomy of the Wives of Former Convicted Terrorists* ..... 173-182  
Fitria Sari
- Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan / *Reconstructing the Notion of Nationalism: Conversations About Women and Nationalism* ..... 183-192  
Ruth Indiah Rahayu dan Iqraa Runi Aprilia

## Perempuan dan Kebangsaan *Women and Nationalism*

**P**roklamasi 1945 telah dideklarasikan tujuh puluh tiga tahun silam, tetapi hari ini kita masih menghadapi problem kebangsaan. Reformasi 1998 yang membuka pintu bagi berbagai ideologi turut memberi jalan bagi kekuatan konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun atas dasar konsepsi antikolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima. Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007) mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang "Kewajiban dan Cita-Cita Putri Indonesia" telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama. Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara, dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga. Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth I Rahayu 2017).

Situasi ini mendorong *Jurnal Perempuan* membuka ruang percakapan untuk mendiskusikan politik perempuan dalam menanggapi problem kebangsaan dan agensi perempuan dalam mentransformasi kebangsaan-Indonesia hingga dewasa ini. Ruang percakapan ini sangat penting bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, karena konsep dan nilai kebangsaan kerap mengatasnamakan kepentingan perempuan. Meskipun yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya, dua puluh tahun reformasi justru diisi dengan munculnya peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatasnamakan moralitas dan agama yang ironisnya dalam proses penyusunannya juga didukung dan/atau diusung oleh partai politik nasionalis/sekuler. Pelabelan negatif terhadap kelompok yang dianggap

berbeda masih sering terjadi, baik terhadap hal keyakinan atau aliran kepercayaan; orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender; maupun pilihan dan afiliasi politik. Tak jarang pelabelan negatif ini kemudian mengarah pada tindakan persekusi. Kondisi ini tentu tidak hanya mengancam kehidupan perempuan dan kelompok marginal, tetapi juga konsensus kebangsaan dan kehidupan demokrasi.

Para sarjana feminis mengkritik diabaikannya perempuan dan gender dalam kajian tentang kebangsaan. Mereka mengkaji nasionalisme/kebangsaan dengan dua pendekatan utama: pertama melalui pemeriksaan terhadap peran perempuan dalam gerakan kebangsaan, kedua lewat pengembangan teori dalam menganalisis cara-cara 'bangsa' didasarkan pada identitas dan makna gender tertentu (Ranchod-Nilsson & Tetreault 2000). Lebih jauh para feminis juga berfokus pada cara-cara perempuan bukan hanya menjadi simbol wacana kebangsaan dalam hal konstruksi bangsa dan gender, tetapi juga mampu merestrukturisasi proyek-proyek kebangsaan untuk memasukkan tujuan feminis (Vickers 2006 dikutip dalam Kaufman & Williams 2011).

Riset *Jurnal Perempuan* yang mengupas percakapan perempuan atau feminis tentang kebangsaan mengungkap bahwa perempuan selalu menjadi alat mobilisasi kebangsaan, meskipun perempuan memiliki kepentingan yang "independen" terhadap kebangsaan. Namun demikian kepentingan perempuan tersebut dipandang sebelah mata oleh aktor-aktor politik yang mengelola negara. Di sisi lain upaya mobilisasi dan politisasi perempuan juga digunakan untuk menolak ide kebangsaan dan menyebarkan gagasan radikal-fundamentalis seperti temuan kajian tentang pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Selain itu, artikel-artikel dalam edisi ini juga menunjukkan bahwa penulisan sejarah dan narasi perempuan terkait tema kebangsaan baik dalam bentuk kajian akademis maupun budaya populer (film) juga masih diwarnai adanya bias gender, kelas, ras, etnis, agama, dll. Untuk itu dibutuhkan pendekatan interseksional agar dapat menangkap dan memahami gagasan, jejak dan aktivitas perempuan dalam memaknai dan menghidupi konsep kebangsaan. Sementara itu sepanjang sejarah perjalanan kebangsaan dari awal munculnya gagasan kebangsaan hingga hari ini perempuan telah dan masih bergelut dan bekerja dalam aktivitas sehari-hari di ranah kewargaan untuk membangun masyarakat warga dan mereproduksi kebangsaan. (Anita Dhewy)



---

Siti Utami Dewi Ningrum (Program Studi S2 Ilmu Sejarah  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  
Indonesia)

**Kebangkitan Para "Ibu Bangsa" Sejak Masa Pergerakan  
Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia**

***The Revival of the "Mothers of the Nation" from the Period of  
Anti Colonial Movement until the Independence of Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 129-141, 8 gambar,  
38 daftar pustaka

"Mothers of the Nation" or *ibuism* is a term that is often considered negative in the study of women's history. This is related to the nation's political journey, during which the New Order regime took power, the terminology was used to control and dominate women in Indonesia. Further explored, in the 1920s, the spirit of nationalism are grew, including among the (*priayi*) noble women. They formed an association and held the Indonesian Women's Congress I in 1928. According to Susan Blackburn, what women did at the time was their nationalistic form, becoming "Mothers of the Nation." Using a historical approach, this paper seeks to retrace how early noble women came into existence and formulated their ideas of nationalism. The sources used are the result of literature studies, whether magazines, books, scientific papers, memoirs or biographies of women movement. This paper also use oral and photo sources to complete the experiences of women who involved in this topic.

Keywords: mothers of the nation, women's history, nationalism, noble women

"Ibu Bangsa" atau ibuisme merupakan terminologi yang sering kali dianggap bermakna negatif dalam kajian tentang sejarah perempuan. Hal ini berkaitan dengan perjalanan politik bangsa, di mana saat rezim Orde Baru berkuasa, terminologi tersebut digunakan untuk mengontrol dan mendomestikasi perempuan di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, pada tahun 1920-an, semangat kebangsaan semakin membara, termasuk di kalangan perempuan priayi. Mereka membentuk perkumpulan hingga mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928. Menurut Susan Blackburn, yang dilakukan oleh para perempuan saat itu adalah bentuk nasionalisme mereka, menjadi "Ibu Bangsa". Menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini berusaha merunut kembali bagaimana perempuan priayi mula-mula hadir dan merumuskan idenya tentang semangat berkebangsaan. Sumber-sumber yang digunakan merupakan hasil dari studi pustaka, baik majalah, buku, karya ilmiah, memoar maupun biografi para perempuan pergerakan. Digunakan pula sumber lisan dan foto untuk dapat melengkapi pengalaman perempuan yang terlibat dalam tema tulisan ini.

Kata kunci: ibu bangsa, sejarah perempuan, nasionalisme, perempuan priayi

---

Meike Lusye Karolus (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara,  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**Perempuan dalam Film Indonesia Tentang  
"Indonesia Timur"**

***Women in Indonesian Films about "Eastern Indonesia"***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 143-152, 4 gambar,  
36 daftar pustaka

The purpose of this study is to explain about women's positions and roles that are represented in films as agents who frame identity and ethnical stereotype of "the East". By using intersectional feminist perspective, the study analyse texts from three Indonesian films which using film sets in the regions of Eastern Indonesia as follows: *Aisyah: Let Us Be a Family* (2016), *Salawaku* (2016), and *Marlina, the Murderer in Four Acts* (2017). Findings show that films about Eastern Indonesia still embed with the perspectives of orientalism and colonialism. Women from non-Eastern Indonesia are commonly represented to having superior positions and important roles in educating and spreading the feeling of nationalism. On the other hand, Eastern Indonesian women are mostly represented inferior and alienated from their communities and nature.

Keywords: film, representation, orientalism, colonialism, intersectionality

Tulisan ini bertujuan menjelaskan posisi dan peran perempuan yang direpresentasikan dalam film sebagai agen yang membingkai identitas dan stereotip etnis "Timur". Dengan menggunakan perspektif feminis interseksional, penelitian ini menganalisis teks-teks dari tiga film Indonesia yang berlokasi di wilayah Indonesia Timur, yaitu *Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara* (2016), *Salawaku* (2016), dan *Marlina, Si Pembunuh dalam 4 Babak* (2017). Hasilnya, film-film tentang Indonesia Timur masih melekat dengan perspektif orientalisme dan kolonialisme. Perempuan dari non Indonesia Timur direpresentasikan memiliki posisi yang lebih superior dan berperan penting dalam mengedukasi dan menyebarkan rasa nasionalisme. Di sisi lain, perempuan Indonesia Timur direpresentasikan inferior dan terasing dari komunitas dan alamnya.

Kata kunci: film, representasi, orientalisme, kolonialisme, interseksionalitas

---

Mutiah Amini (Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan  
Penulisan Sejarah Perempuan**

***Gender Bias in Historiography of Indonesia and  
the Writing of Women's History***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 153-160, 30 daftar  
pustaka

This paper discusses gender bias within the Indonesian historiography tradition. Various historical literature records that all major events in Indonesian history—as a nation—are masculine and strongly dominated by male narratives. There is no space for women to be present in the narratives of the past. As if the history of Indonesia is a history of men, whereas if critical research is done then women such as men have a past narrative that is also important. Women are present and give meaning to the development of the nation's history. This matter is absent in Indonesian historiography. The strength of gender bias in the historiography of Indonesia can not be separated from the strong patriarchal culture in the life of society. Thus the gender bias ultimately forms a canon, so this is then reproduced from generation to generation. This article argues that critical research by revealing a new fact is a power to change gender bias in Indonesian historiography.

Keywords: gender bias, nationalism awareness, women's history writing

Tulisan ini mendiskusikan tentang bias gender di dalam tradisi historiografi Indonesia. Berbagai kepustakaan sejarah mencatat bahwa semua peristiwa besar terkait dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa, bersifat maskulin dan sangat didominasi oleh narasi laki-laki.

Tidak ada sedikit pun ruang bagi perempuan untuk hadir di dalamnya. Seakan-akan sejarah Indonesia adalah sejarahnya laki-laki, padahal jika penelitian kritis dilakukan maka perempuan seperti halnya laki-laki mempunyai narasi masa lalu yang tidak kalah penting. Perempuan hadir dan memberi arti bagi perkembangan sejarah bangsa. Hal inilah yang absen dalam historiografi Indonesia. Kuatnya bias gender di dalam historiografi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian bias gender pada akhirnya membentuk sebuah kanon, dan kemudian direproduksi dari generasi ke generasi. Artikel ini berargumen penelitian kritis dengan mengungkapkan fakta baru merupakan kekuatan untuk mengubah bias gender di dalam historiografi Indonesia.

Kata kunci: bias gender, kesadaran kebangsaan, penulisan sejarah perempuan

---

Lelly Andriasanti (Qureta, Jakarta, Indonesia)

### **Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017**

#### ***Ibuisms of Political Islam in the Election of Jakarta Governor in 2017***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 161-171, 2 tabel, 1 gambar, 18 daftar pustaka

The chaotic political issues always accompany the nation of Indonesia until this day. One of them is reflected in political dimension which summarized on the intolerance narrative in the election of Jakarta governor in 2017. Nonetheless, gender and women dimensions seem to shrink from public attention. Within the framework of the state, the important role of women for national life is reduced in the ideology of ibuisms. This ideology actually finds a way in triggering activation of women when adapting to Political Islam. For that reason, research question of this paper is how the ibuisms of political Islam affect the perception and preferences of female voters in the election of Jakarta governor in 2017? In order to answer the question, this paper uses a qualitative methodology with a phenomenological approach. As the final result, this paper conclude that in the framework of ibuisms of political Islam, women played a role as agent which directing women voter perception. It is worked in taklim's mobilization network where women voter are asked vow to vote or do not vote particular candidate in Jakarta governor election in 2017.

Keywords: ibuisms of political Islam, Jakarta governor election, state ibuisms, politization of women's voice

Carut-marut persoalan politik selalu mengiringi perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini. Salah satunya tampak pada dimensi politik yang terangkum dalam narasi intoleransi di Pilgub Jakarta 2017. Walakin, dimensi gender dan perempuan seolah-olah menyusut dari perhatian publik. Dalam kerangka negara, peran penting perempuan dalam kehidupan kebangsaan direduksi dalam paham ibuisme. Ideologi ini justru menemukan jalan dalam memicu aktivasi perempuan ketika beradaptasi dengan Islam Politik. Atas dasar itulah, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana ibuisme Islam politik memengaruhi persepsi dan preferensi pemilih perempuan dalam Pilgub Jakarta 2017? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai hasil akhir, tulisan ini menyimpulkan kerangka ideologi ibuisme Islam Politik telah mendorong perempuan untuk memainkan peran sebagai agen yang mengarahkan persepsi pemilih perempuan. Hal ini dilakukan dalam jejaring mobilisasi taklim atau pengajian di mana para pemilih perempuan dimintai sumpah untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu dalam Pilgub Jakarta 2017.

Kata kunci: ibuisme Islam politik, Pilgub Jakarta, ibuisme negara, politisasi suara perempuan.

---

Fitria Sari (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia)

### **Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme**

#### ***Negotiation and Autonomy of the Wives of Former Convicted Terrorists***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 173-182, 6 daftar pustaka

The discussion on terrorism is currently focused on issues concerning law enforcement efforts, cooperation between defense institutions, analysis of legal policies, and definitions of terrorism. Women (especially wives) are excluded from the process of dialogue and response to terrorism. This study emphasizes the experience and voice of the wives of former convicted terrorists. This article explores the process of upheaval and negotiation from the extremist narratives contained in the logic of thinking as a struggle in the context of self-acceptance and autonomy. This study uses a case study approach with a feminist perspective, and in-depth interviews as a method of data collection. The feminist view of Relational Autonomy and the Politics of Piety was chosen as a theoretical framework for analyzing findings. The results of the study indicate that there is an indoctrination from the husband about the teachings of extremism and that the wife experiences a struggle to internalize the teaching. On the other hand, there are also findings that show wives also negotiate with their husbands in carrying out the teachings of extremism. The conclusion of this study shows that the wife's figure experiences the process of constructivism and relational autonomy in the struggle process and its negotiations so far. In addition, the wife can also be seen as an agent to strengthen the spirit of nationalism through the values of tolerance.

Keywords: terrorism, extremism, wife of former convicted terrorist, husband and wife relations, relational autonomy

Diskursus terorisme saat ini masih berfokus pada isu tentang upaya penegakan hukum, kerjasama antar lembaga pertahanan, analisis kebijakan hukum, dan definisi tentang terorisme. Perempuan (khususnya istri) menjadi sosok yang teresklusi dalam proses dialog dan respons mengenai terorisme. Penelitian ini menekankan pada pengalaman dan suara dari para istri mantan narapidana terorisme. Artikel ini mengupas proses pergolakan dan negosiasi dari narasi ekstremis yang terdapat pada logika berpikir sebagai sebuah perjuangan dalam konteks penerimaan dan otonomi diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perspektif feminis, dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Pandangan feminis tentang Otonomi Relasional dan Politik Kesalahan dipilih sebagai kerangka teori untuk menganalisis temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indoktrinasi dari suami tentang ajaran ekstremisme dan istri mengalami pergulatan untuk menginternalisasi ajaran tersebut. Di sisi lain, ada pula temuan yang menunjukkan para istri juga melakukan negosiasi kepada suami dalam menjalankan ajaran ekstremisme. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok istri mengalami proses konstruktivisme dan otonomi relasional dalam proses pergulatan dan negosiasinya selama ini. Selain itu, istri juga dapat dilihat sebagai agen untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui nilai-nilai toleransi.

Kata Kunci: terorisme, ekstremis, istri mantan narapidana terorisme, relasi suami istri, otonomi relasional

---

Ruth Indiah Rahayu<sup>1</sup>, Iqraa Runi Aprilia<sup>2</sup> (<sup>1</sup>Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif [Inkrispena], Jakarta, Indonesia; <sup>2</sup>Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan**



***Reconstructing the Notion of Nationalism: Conversations  
About Women and Nationalism***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 183-192, 16 daftar  
pustaka

Contemporary feminists in Indonesia do not yet have questions about nationalism, since the conversation about nationalism has been considered final at the beginning of Indonesian independence. In fact, in terms of contemporary analysis, women have problems with nationalism, when the definition of nationalism is dominated by the study of political science that is male-view biased. By tracing history to contemporary time, the relationship between women and nationalism is dominated by patriarchal interests for the mobilization of power, even if women have an independent political interest. That is why political interests of women are situated marginally in nationalism. But if we use the perspective of the social sciences, as feminist theories, then the notion of nationalism is broader than that of women and the state. We are still less productive in abstracting the relationship between women and citizens in nationalism, while it is a daily practice of women's struggles both personally and organically. Women have proven to be an active agency to become citizens beyond the mobilization of the state. This paper seeks to arouse feminist questions about nationalism, in order to reveal the role of women who are hidden in nationalism.

Keywords: feminist talks, feminist question, women, nationalism, citizenship, marginally situated

Feminis kontemporer di Indonesia belum mempunyai pertanyaan tentang kebangsaan, karena percakapan tentang kebangsaan telah dianggap final pada awal kemerdekaan Indonesia. Faktanya, ditinjau dari kondisi dan waktu kontemporer, perempuan mempunyai problem dengan kebangsaan, ketika definisi kebangsaan didominasi oleh studi ilmu politik yang bias *male-view*. Dengan merunut sejarah hingga waktu kontemporer, relasi antara perempuan dan kebangsaan didominasi oleh kepentingan patriarki untuk mobilisasi kekuasaan, sekalipun perempuan mempunyai kepentingan politik yang independen. Itu sebabnya kepentingan politik perempuan disituasikan marginal dalam kebangsaan. Akan tetapi jika kita menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial, sebagaimana teori-teori feminis, maka pengertian kebangsaan lebih luas dari sekadar relasi perempuan dan negara. Kita masih kurang produktif dalam mengabstraksikan relasi perempuan dan kewargaan di dalam kebangsaan, padahal itulah praktik sehari-hari yang diperjuangkan perempuan secara pribadi maupun terorganisasi. Perempuan telah terbukti menjadi agensi yang aktif untuk menjadi warga dan warga negara melampaui mobilisasi negara. Tulisan ini berusaha untuk membuat pertanyaan feminis tentang kebangsaan, agar dapat mengungkap peranan perempuan yang disituasikan tersembunyi dalam kebangsaan.

Kata kunci: percakapan feminis, pertanyaan feminis, perempuan, kebangsaan, kewargaan, disituasikan marginal



## Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan

### *Reconstructing the Notion of Nationalism: Conversations About Women and Nationalism*

**Ruth Indiah Rahayu dan Iqraa Runi Aprilia**

Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) & Jurnal Perempuan

Jl. Lapangan Ros II No.42, Tebet, Jakarta Selatan, 12840, Indonesia

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia

ruthindiahrahayu@gmail.com & iqraa@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 1 Agustus 2018, direvisi 4 Agustus 2018, diputuskan diterima 9 Agustus 2018

#### Abstract:

Contemporary feminists in Indonesia do not yet have questions about nationalism, since the conversation about nationalism has been considered final at the beginning of Indonesian independence. In fact, in terms of contemporary analysis, women have problems with nationalism, when the definition of nationalism is dominated by the study of political science that is male-view biased. By tracing history to contemporary time, the relationship between women and nationalism is dominated by patriarchal interests for the mobilization of power, even if women have an independent political interest. That is why political interests of women are situated marginally in nationalism. But if we use the perspective of the social sciences, as feminist theories, then the notion of nationalism is broader than that of women and the state. We are still less productive in abstracting the relationship between women and citizens in nationalism, while it is a daily practice of women's struggles both personally and organically. Women have proven to be an active agency to become citizens beyond the mobilization of the state. This paper seeks to arouse feminist questions about nationalism, in order to reveal the role of women who are hidden in nationalism.

Keywords: feminist talks, feminist question, women, nationalism, citizenship, marginally situated

#### Abstrak

Feminis kontemporer di Indonesia belum mempunyai pertanyaan tentang kebangsaan, karena percakapan tentang kebangsaan telah dianggap final pada awal kemerdekaan Indonesia. Faktanya, ditinjau dari kondisi dan waktu kontemporer, perempuan mempunyai problem dengan kebangsaan, ketika definisi kebangsaan didominasi oleh studi ilmu politik yang bias *male-view*. Dengan merunut sejarah hingga waktu kontemporer, relasi antara perempuan dan kebangsaan didominasi oleh kepentingan patriarki untuk mobilisasi kekuasaan, sekalipun perempuan mempunyai kepentingan politik yang independen. Itu sebabnya kepentingan politik perempuan disituasikan marginal dalam kebangsaan. Akan tetapi jika kita menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial, sebagaimana teori-teori feminis, maka pengertian kebangsaan lebih luas dari sekadar relasi perempuan dan negara. Kita masih kurang produktif dalam mengabstraksikan relasi perempuan dan kewargaan di dalam kebangsaan, padahal itulah praktik sehari-hari yang diperjuangkan perempuan secara pribadi maupun terorganisasi. Perempuan telah terbukti menjadi agensi yang aktif untuk menjadi warga dan warga negara melampaui mobilisasi negara. Tulisan ini berusaha untuk membuat pertanyaan feminis tentang kebangsaan, agar dapat mengungkap peranan perempuan yang disituasikan tersembunyi dalam kebangsaan.

Kata kunci: percakapan feminis, pertanyaan feminis, perempuan, kebangsaan, kewargaan, disituasikan marginal

#### Pendahuluan

Mengapa kita mempercakapkan kebangsaan? Oleh karena kita—feminis saat ini—belum mempunyai pertanyaan tentang kebangsaan. Mengapa harus? Mari sejenak merenungkan pertanyaan Virginia Woolf tentang kebangsaan.

*What does our country mean to me, an outsider? ... In fact, as a women, I have no country. As a women I want no country. As*

*a women my country is the whole word.* (Woolf dikutip dalam West 2013, h. xi)

Pertanyaan Virginia Woolf yang dikutip oleh West itu sangat provokatif dalam mengganggu 'kemapanan' berpikir kita tentang kebangsaan. Mengapa? Di negara mantan jajahan sebagaimana Indonesia, kebangsaan direbut melalui perang dan kaum perempuan berada di luar keputusan tentang perang (Dobbin 1980). Oleh

karena itu, ketika negara merdeka itu eksis, seluruh percakapan tentang negara dan bangsa didominasi oleh aktor politik laki-laki yang memutuskan berperang memerdekakan negara dan selanjutnya yang memutuskan bagaimana negara merdeka itu dikelola.

Maka dari itu sekiranya kita (kaum perempuan) bertanya: apa bedanya negara Hindia Belanda dan Indonesia bagi perempuan, terlebih bagi kita yang tidak hidup di masa lalu pada saat penjajahan? Bagaimana perempuan bisa menjadi nasionalis ketika lebih banyak dimobilisasi untuk menunaikan kewajiban bagi negara-bangsa ketimbang memperoleh hak? Bagaimana perempuan bisa menjadi nasionalis ketika nasionalisme lebih dipahami secara maskulin sebagai urusan kekuasaan negara ketimbang mereproduksi warga negara yang beradab? Jika kita kaum perempuan bertanya seperti itu maka apakah sesungguhnya perempuan melampaui pengertian kebangsaan yang didefinisikan secara maskulin? Tulisan ini merupakan percakapan perempuan atau feminis yang berusaha membuat pertanyaan tentang kebangsaan. Percakapan ini diharapkan dapat berkembang untuk membuka pertanyaan-pertanyaan baru yang progresif mengenai kebangsaan versi pandangan perempuan.

Untuk menyusun pertanyaan tentang kebangsaan, Tim *Jurnal Perempuan* menggunakan metode titik pijak (Harding 2004) yaitu berpijak pada posisi perempuan yang disituasikan secara sosial (bahkan juga politik) dalam kebangsaan.<sup>1</sup> Untuk itu Tim *Jurnal Perempuan* mengumpulkan *pengalaman dan pengetahuan feminis*<sup>2</sup>—perempuan dan laki-laki—baik dalam kapasitas personal maupun gerakan kolektif, baik dari masa sekarang maupun masa lalu. Sejumlah narasumber feminis yang telah membagikan pengalamannya kepada Tim *Jurnal Perempuan* adalah Musdah Mulia, Ery Seda, Nur Iman Subono, Bivitri Susanti, Indrasari Tjandraningsih, Olin Monteiro dan Andi Achdian, dalam pertemuan yang secara khusus mempercakapkan perempuan dan kebangsaan. Selain itu Tim membuka arsip-arsip percakapan perempuan dan kebangsaan dalam kongres-kongres di masa lalu, mencatat percakapan para feminis di Komnas Perempuan dalam rangka merefleksikan “20 Tahun Reformasi”<sup>3</sup>, dan percakapan di kalangan generasi milenium.

Ketika kami mengumpulkan dan mengolah percakapan ini, kami pun turut bercakap di dalamnya, hingga tulisan ini merupakan *tutur perempuan* tentang kebangsaan. Metode tutur perempuan telah dipergunakan oleh kelompok Lingkar Tutur Perempuan yang dikelola oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)

sejak 2000-an untuk menyusun narasi perempuan yang marginal. Dengan demikian tulisan ini berupaya untuk menarasikan percakapan perempuan setelah 20 tahun reformasi guna menyusun pertanyaan kita tentang kebangsaan.

## Cuaca Perempuan dan Kebangsaan Pascareformasi

Percakapan feminis dimulai dari pertanyaan tentang keadaan relasi perempuan dan kebangsaan “setelah 20 tahun reformasi 1998”. Seluruh narasumber feminis yang telah kami sebutkan di atas berpendapat bahwa gagasan dan praktik kebangsaan sepanjang perjalanannya lebih banyak didominasi oleh kepentingan politik yang berlandaskan pada dominasi politik (ekonomi) patriarki. Oleh sebab itu diskursus yang selalu menonjol adalah mobilisasi perempuan ke dalam pelbagai kepentingan rezim negara terhadap perempuan.

Musdah Mulia menilai bahwa setelah reformasi sebagian perempuan Indonesia tidak lagi dekat dengan ide kebangsaan. Hal itu mempunyai korelasi dengan perkembangan internasionalisme Islam yang di dalam negeri diusung oleh kelompok Islam-radikal-fundamentalis<sup>4</sup>. Kelompok ini mempromosikan ide jihad untuk tiga tujuan: *pertama*, mengganti negara dengan ide Negara Islam Indonesia (NII) dan *Khilafah* Islamiah. *Kedua*, menyemai pemikiran radikalisme ke dalam semua partai politik untuk membakukan syariat melalui pembuatan aturan perundangan. *Ketiga*, menciptakan bentuk tindak kekerasan untuk mengintimidasi dan meneror masyarakat. Anehnya penolakan terhadap ide kebangsaan itu seperti mendapat sambutan dari masyarakat luas termasuk perempuan. Perempuan-perempuan pendukung ide radikal-fundamentalis berkeinginan untuk menjadi *mujahidah*, yaitu perempuan yang berjihad di jalan agama, maka tidak heran jika saat ini ada banyak perempuan yang menggeluti bidang keagamaan untuk membangun *khilafah* Islam (bukan keindonesiaan).

Dalam pengamatan Musdah Mulia, saat ini telah terjadi mobilisasi perempuan untuk dipergunakan sebagai salah satu alat penggerak agenda politik radikal-fundamentalis Islam. Mobilisasi perempuan ke dalam gerakan ini tampaknya mempertimbangkan perempuan sebagai kekuatan yang dianggap loyal dalam menjalankan agama, melayani suami dan mengurus keluarga. Oleh karena itu, selama reformasi ini kelompok Islam radikal-fundamentalis sangat masif dalam berpropaganda untuk mengatur tubuh perempuan (ibu dan anak perempuan) dalam berpakaian, memilih

pasangan hidup, menentukan jumlah anak, dan bahkan untuk teror (dalam kasus bom bunuh diri).

Realitas yang dikemukakan Musdah Mulia itu dibenarkan oleh Nur Iman Subono sebagai paradoks reformasi dan berkembangsuburnya konservatisme yang berlatar agama maupun etnik/golongan. Tumbuhnya politik identitas yang mengatasnamakan etnik/golongan dan agama dalam pemilu (legislatif maupun eksekutif) adalah wujud mobilisasi perempuan pemenangan kandidat. Jika dilihat lebih cermat, mobilisasi perempuan ke dalam pemilu (sebagai pemberi suara) justru menggunakan diskursus domestikasi perempuan dan keluarga menurut terminologi agama.

Musdah menambahkan bahwa masa reformasi merupakan masa “kebebasan” yang dimanfaatkan oleh gerakan Islam yang radikal-fundamentalis yang pernah mengalami tekanan selama Orde Baru untuk melebarkan pengaruhnya. Itu sebabnya reformasi membantu mereka untuk mengampunayakan wacana ideologi-politik mereka, yaitu membangun *Khilafah* Islamiah. Gagasan ini menurut Musdah sesungguhnya utopis (belum pernah empiris) dan telah menjadi gerakan transnasional yang berhasil membuai kaum perempuan ke dalam harapan yang tidak konkret.

Ery Seda sependapat dengan pandangan sebelumnya bahwa kesadaran kebangsaan telah menghilang pascareformasi. Akan tetapi yang aneh bahwa hilangnya kesadaran kebangsaan malah mendorong perempuan tertarik pada isu keagamaan. Dengan kata lain kosongnya kesadaran kebangsaan dengan mudah diisi oleh kesadaran tentang jihad dan menjadi *mujahidah*. Nilai-nilai keagamaan yang konservatif itu menguat karena generasi muda tidak memiliki kedalaman konseptual sehingga mereka mudah terpengaruh oleh isu yang menjadi tren, meskipun hal itu sangat konservatif. Bersamaan dengan itu perempuan semakin menjadi korban. Indonesia pascareformasi masih memproduksi kebijakan yang bias gender atau merugikan perempuan dan hal ini memperlihatkan konservatisme berdampak ke perempuan baik secara langsung maupun melalui kebijakan yang diskriminatif.

Olin Monteiro mencatat bahwa keadaan perempuan dan anak di daerah-daerah pascakonflik selama dan sebelum reformasi masih menyimpan trauma masa lalu yang belum selesai. Luka yang tidak lekas sembuh mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap negara dan keindonesiaan. Sementara generasi milenial kehilangan jejak cerita tentang kebangsaan akibat membanjirnya informasi yang membenarkan konservatisme tumbuh subur.

Tentang mobilisasi perempuan sesungguhnya tidak hanya terjadi pada ranah politik, melainkan juga pada ranah ekonomi. Menurut pengamatan Indrasari Tjandraningsih, pemerintah Orde Baru telah memobilisasi perempuan untuk menjadi buruh pabrik sejak 1970-an di kawasan industri Tangerang, Bekasi, Rancaekek-Bandung, Sidoarjo, Medan, Makassar. Perempuan itu dimobilisasi ke dalam industri padat karya yang memproduksi kosmetik, tekstil, pakaian, biscuit, garmen, dll, yang di dalamnya melekat modus eksploitasi terhadap buruh perempuan. Mobilisasi perempuan dalam perburuan ini sering kali dikaitkan untuk peningkatan investasi negara. Hal itu serupa dengan kebijakan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke negara-negara Arab, Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hong Kong yang sesungguhnya adalah memobilisasi perempuan ke pasar kerja internasional untuk jenis kerja domestik. Mobilisasi buruh migran perempuan itu, sekali lagi, selalu dikaitkan untuk kepentingan pemupukan devisa negara. Berdasarkan penelitian Samia Dinkelaker<sup>5</sup>, sebelum dikirim ke negara tujuan, buruh-buruh migran itu didoktrin sebagai perempuan yang harus menjunjung nilai agama, membela nama baik negara, dan harus bersikap sebagaimana perempuan yang baik dalam melayani majikan. Perlu diperhatikan bahwa nilai kebangsaan dipergunakan untuk membangun kepatuhan buruh migran yang akan bekerja di luar negeri.

Menurut Bivitri Susanti, politik identitas sesungguhnya telah menjadi modus lama di bidang hukum. Pada masa kolonial, sekitar 1920, pemerintah kolonial telah membuat aturan hukum untuk membedakan identitas Pribumi, Timur Asing dan Eropa, untuk mengatur warga negara. Pada masa pascareformasi ini aturan hukum juga dipergunakan untuk mengatur politik identitas: muslim dan nonmuslim, serta perempuan dan nonperempuan. Pada era ini produk hukum untuk mengatur perempuan (yang jatuhnya diskriminatif) sangat produktif dan mengkhawatirkan relasi kemajemukan di dalam keindonesiaan, terutama dalam bentuk Peraturan Daerah. Akan tetapi di sisi lain terjadi perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai asumsi *equality before the law* yang menjadi landasan bahwa semua warga negara (subjek) sama di mata hukum. Walaupun teori hukum feminis menaruh curiga pada asumsi tersebut karena pada umumnya bersifat bias laki-laki.

Percakapan feminis untuk mendeskripsikan perempuan dan kebangsaan “setelah 20 tahun reformasi” itu berujung pada masalah yang disebut Nur Iman Subono: kontradiksi di dalam tubuh kebangsaan.



Sebagai contoh pada masa Orde Baru dan bahkan Orde Lama pun asumsi tentang kebangsaan adalah persatuan yang memusat pada pimpinan negara. Akan tetapi pada pascareformasi ini kebangsaan tumbuh menjadi 'etnonasionalis' yang mengunggulkan politik identitas, sekalipun juga tidak tertutup oleh masuknya ide-ide dari luar kebangsaan Indonesia. Musdah Mulia menegaskan bahwa kontradiksi di dalam tubuh kebangsaan itu merupakan warisan masa lalu yang belum membuat batas jelas (*clear and distinct*) negara dan agama. Bivitri Susanti menambahkan bahwa ide untuk membuat batas jelas antara negara dan agama pernah dibahas dalam sidang Konstituante membahas UUDS 1950—bahkan telah dipercakapkan dalam sidang BPUPKI—tetapi selalu mengalami *deadlock*.

### **Konstruksi Moralitas Tubuh Perempuan dalam Tubuh Kebangsaan**

Menurut Musdah Mulia sepanjang batas negara dan agama belum jelas, maka relasi perempuan dan kebangsaan pun kabur dan selalu dalam tegangan antara yang sekuler versus agama. Akan tetapi Andi Achdian berpendapat baik "negara" maupun "agama" selalu konsisten dalam menilai perempuan dalam relasinya dengan kebangsaan. Sejak masa prakemerdekaan sampai pascareformasi, penilaian terhadap perempuan konsisten dalam menempatkan tubuh perempuan sebagai pusat moralitas. Pusat moral perempuan adalah tubuhnya yang diasosiasikan dengan moral kebangsaan hingga tubuh perempuan harus dijaga dan diselamatkan dari gangguan yang *evil* (kejahatan) sebagaimana menjaga dan menyelamatkan kebangsaan.

Menurut Andi Achdian pandangan moral atas tubuh perempuan itu tercermin dalam sejarah melalui pemikiran Soetomo yang membangun "rumah singgah" di Surabaya bagi pekerja seks bumiputra untuk memperoleh rehabilitasi sebagai pekerja seks. Soetomo berangkat dari argumen bahwa moralitas kebangsaan harus dibangun dengan memperhatikan dan menjaga tubuh perempuan pribumi sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Soetomo tak bisa menerima tubuh perempuan bumiputra diperlakukan semena-mena, rendah dan rasis oleh laki-laki kulit putih kolonial. Perlakuan orang-orang kulit putih itu mencerminkan konsep superioritas kolonial terhadap pribumi, bahkan perempuan kulit putih merasa tercela bergaul dengan perempuan pribumi. Sebaliknya, laki-laki Belanda juga memandang tubuh perempuan kulit putih sebagai pusat moral. Ketika foto telanjang Margaretha Geertruida atau yang populer dengan nama

Matahari beredar dalam bentuk kartu pos, hal itu menjadi percakapan yang ramai di surat kabar bahasa Belanda di Hindia Belanda. Percakapan itu mempertanyakan "Mengapa ada perempuan Belanda yang merendahkan martabat orang Eropa di mata orang lain!"

Memandang tubuh perempuan sebagai pusat moralitas menurut Andi Achdian memberi petanda bahwa di dalam politik pergerakan prakemerdekaan, moralitas tubuh perempuan telah menjadi bagian dari kontestasi antara kaum nasionalis dan kolonial. Akan tetapi ditegaskan oleh Andi Achdian bahwa pandangan Soetomo berangkat dari moralitas nasionalis yang sekuler dalam memandang tubuh perempuan, dan tidak ada singgungannya dengan agama. Jadi, konstruksi ideologi gender dalam kebangsaan berangkat dari moralitas nasionalis sekuler dalam menafsirkan martabat tubuh perempuan pribumi yang direndahkan oleh moralitas kolonial.

Dalam perkembangannya dimensi moral atas tubuh perempuan bersinggungan dengan agama, dan hal itu menguat setelah reformasi dengan tubuh perempuan dinyatakan sebagai aurat yang harus ditutup rapat, dan harus dikendalikan mobilitas kebebasannya di ranah publik. Justru pascareformasi lahir undang-undang dan peraturan daerah yang kontradiktif, di satu pihak dimaksudkan untuk melindungi perempuan, tetapi di lain pihak konsep perlindungan itu bias norma maskulin terhadap moralitas tubuh perempuan, sehingga norma hukum itu diskriminatif terhadap perempuan. Tambahan pula, norma maskulin yang menjadi rujukan untuk mengatur moralitas tubuh perempuan berdasarkan pada tafsir radikal-fundamentalis terhadap islam. Cara pandang yang bias maskulin itu menganggap tubuh perempuan sebagai pusat kecabulan (*evil*) maka dari itu harus dilindungi agar menjadi pusat kesucian. Contoh peraturan tersebut adalah UU Pornografi, peraturan daerah di Tangerang dan Gorontalo yang melarang perempuan keluar malam, peraturan daerah di Tasikmalaya yang mengharuskan perempuan memakai jilbab.

Moralitas tubuh perempuan secara sosiologis dan politis dilokasikan pada konsep "ibu". Di dalam keluarga posisi ibu adalah pusat moralitas yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap baik-buruknya perilaku (normatif), kesehatan dan prestasi anak dan suami. Dalam pidatonya, Sukarno<sup>6</sup> maupun Suharto<sup>7</sup> menuntut ibu sebagai "ibu bangsa", "ibu keluarga", dan istri pasangan suami. Makna ibu itu pun berubah-ubah seturut dominasi rezim yang menguasai praktik kebangsaan. Dalam masa revolusi makna ibu yang dikampanyekan adalah "ibu

revolusioner” yang meninggalkan kenyamanan dan ikut ke dalam perang gerilya. Menurut Ery Seda, domestikasi pemaknaan ibu yang monumental terjadi ketika hari Kongres Perempuan I, 22 Desember 1928, setelah Indonesia merdeka dilembagakan sebagai hari nasional dengan mengubah makna sejarah “kongres perempuan” menjadi “ibu” yang domestik.

Pada masa Orde Baru makna ibu dimanipulasi sebagai ideologi negara yang secara konseptual disebut “ibuisme negara” dan sampai sekarang ideologi itu sulit ditanggalkan. Tubuh perempuan pada masa Orde Baru dimobilisasi untuk program keluarga berencana, dan membangun NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Orde Baru juga sangat menekankan moralitas keibuan sebagai pasangan suami dan ibuisme negara. Pada masa reformasi, gerakan Islam radikal-fundamentalis pun, menurut Musdah Mulia berusaha merebut makna ibu sebagai pusat moralitas dalam membentuk keluarga “*khilafah*”. Gerakan AILA (Aliansi Cinta Keluarga) merupakan salah satu contoh kelompok perempuan sarjana Islam radikal-fundamentalis yang sedang merebut diskursus ibu dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender menjadi ibu menurut tafsir kemusliman mereka—pusat kesalehan yang propoligami.

Akan tetapi bukan berarti kaum perempuan, terutama yang terorganisasi dalam gerakan pembebasan sejak prakemerdekaan sampai saat ini tidak mempunyai independensi dalam merumuskan dan memaknai identitas dirinya, baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Sekalipun perempuan sering kali dimobilisasi untuk kepentingan politik guna merebut kebangsaan, tetapi menurut Andi Achdian, perempuan dan gerakannya sesungguhnya memiliki independensi terhadap kebangsaan. Kita dapat membuktikan karakter independensi itu melalui pernyataan perempuan di kongres-kongres perempuan dan kongres pemuda sepanjang perjalanan kebangsaan. Meskipun pengumpulan arsip tentang kongres membutuhkan penelitian yang membutuhkan waktu lama, setidaknya kami dapat menyajikan titik integrasi dan titik independensi kepentingan perempuan dan kebangsaan.

Namun demikian Ery Seda mengingatkan bahwa pertanyaan tentang perempuan dan kebangsaan itu tak hanya dalam relasinya dengan negara, melainkan yang justru sangat menunjukkan independensi perempuan ada di ranah kewargaan (*citizenship*). Relasi ini tentang ide praktis sehari-hari, yaitu tentang keberpihakan kepada kondisi-kondisi yang marginal di dalam kewargaan—yang diwarnai oleh norma-norma patriarki. Sampai di sini kita menemukan dua ranah untuk mempercakapkan

perempuan dan kebangsaan, yaitu dalam relasinya dengan negara dan dalam relasinya dengan sesama warga yang majemuk.

### **Momen Integrasi Kepentingan Politik Perempuan dan Kebangsaan**

Harus diakui bahwa ide tentang kesetaraan dan keadilan gender (istilah pada awal abad ke-20 adalah persamaan hak perempuan) sesungguhnya terlebih dulu hadir di Hindia Belanda sebelum ide tentang kebangsaan bergema. Ide kesetaraan dan keadilan gender (feminis abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyebutnya persamaan hak perempuan) telah menjadi perbincangan Kartini dengan Estella Zeehandelaar—feminis dari Belanda—dan Nyonya Ovink-Soer (istri pegawai administrasi pemerintah kolonial Belanda) dalam korespondensi pada 1899 (Pane 1922). Kedua perempuan Belanda itu memperkenalkan ide persamaan hak yang diperjuangkan gerakan feminis Belanda kepada Kartini—terlebih Zeehandelaar—dengan bahasa antarperempuan yang intim mengenai kondisi perempuan sehari-hari. Pada saat Kartini dipenuhi gema keinginan untuk mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, ide tentang kebangsaan Indonesia belum terdengar. Ide persamaan hak itu pun berjalan secara bertahap hingga menjadi gerakan kultural dan politik perempuan yang terorganisasi.

Ide tentang kebangsaan Indonesia pun berjalan bertahap. Bermula dari kesadaran sebagai masyarakat jajahan yang lokal dan kemudian berkembang antarlokal sebagai cikal bakal dalam mengimajinasikan yang nasional. Pelajar sekolah kedokteran, STOVIA, ketika mendirikan Boedi Oetomo pada 1908 masih membicarakan tentang pendidikan bumiputra (Jawa), beasiswa, mendirikan perpustakaan. Dalam perkembangannya ide-ide tentang kebangsaan (sebagai *nation* “Indonesia”) dideklarasikan oleh *Indische Partij* (1912) yang didirikan oleh Douwess Dekker, Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo. Dalam waktu yang begitu cepat bertumbuhan organisasi pemuda dan partai politik yang menggali makna kebangsaan dan menegakkan politik kebangsaan yang berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda (van Miert 2003).

Hal yang menarik, bahwa perkembangan ide menjadi praktik sosial dan politik dari kepentingan perempuan kemudian berintegrasi dalam kepentingan kebangsaan untuk mewujudkan ide kebangsaan sebagai praktik. Meskipun kepentingan kebangsaan lebih dominan disuarakan oleh pemuda, sementara kepentingan

perempuan lebih dominan disuarakan oleh pemuda. Peristiwa politik yang menunjukkan ide persamaan hak dan persatuan Indonesia itu terintegrasi dapat kita tinjau dalam agenda Kongres Pemuda "Indonesia" I di Weltevreden, Batavia pada 1926 (Surjomihardjo 1981). Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani dan wakilnya, Bahder Johan, dan sayang belum diperoleh catatan tentang siapa aktivis perempuan yang hadir di situ, selain Nona Stien Adam dari Manado. Adapun pokok-pokok yang menunjukkan integrasi ide persamaan hak dan persatuan Indonesia adalah butir (4), yang bunyinya demikian:

(4) Untuk mewujudkan persatuan Indonesia itu perlu dipertegas hak yang sama untuk wanita dan pria terhadap Tuhan dan Dunia. Untuk itu diperlukan perluasan lapangan gerak, yang memungkinkan kedudukan dan peranan wanita Indonesia dapat membuka harapan-harapan Nusa dan Bangsa (h. 18)

Terdapat tiga orang yang berpidato tentang persamaan hak dan persatuan Indonesia dalam Kongres tersebut, yaitu Bahder Johan, Nona Stien Adam dari Minahasa dan Tuan Djaksodipoero dari Solo. Entah mengapa komposisi pembicara yang mempercakapkan persamaan hak terdiri dari dua laki-laki dan hanya seorang perempuan. Apakah karena kongres itu berbahasa Belanda, dan kebanyakan aktivis perempuan masih berbahasa daerah atau Melayu kasar? Bahder Johan berpidato sangat panjang, dengan judul "Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat Indonesia", dan ia seperti mewakili aspirasi aktivis perempuan dalam menghubungkan ide persamaan hak dan persatuan (Surjomihardjo 1981).

Adapun Nona Stien Adam berpidato tentang persamaan hak dan menekankan bahwa entitas perempuan itu majemuk karena lokasi budaya yang berbeda-beda, hingga persatuan Indonesia harus memperhatikan aspek perbedaan. Tuan Djaksodipura melaporkan adanya "hukum adat" Swapraja Surakarta yang disebut *rapak lumuh*, yaitu perempuan boleh menuntut cerai (talak dari istri) sebagai aturan untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Adat *rapak lumuh* sangat baik diadopsi sebagai peraturan negara Indonesia (yang dibayangkan) (Surjomihardjo 1981).

Nur Janti (2017) membuat catatan bahwa pada saat Kongres "Sumpah Pemuda" 1928, terdapat 10 orang perempuan yang hadir, yaitu Nona Poernomowulan (guru dan aktif di Jong Java), Siti Sundari (yang menerbitkan majalah berbahasa Jawa *Wanita Sworo* di Pacitan pada 1912), Emma Poeradiredja (aktif di *Jong Java* lalu mendirikan organisasi *Istri Pasundan*), Suwarni Pringgodigdo (pendiri organisasi perempuan *Isteri Sedar*,

kakak sastrawan Suwarsih Djojopuspito), Johana Masdani Tumbuan, Dien Pantouw dan Nona Tumbel (aktif di *Jong Celebes*). Pada kesempatan itu, Nona Poernomowulan berpidato tentang pendidikan perempuan untuk mencerdaskan "bangsa Indonesia" yang diimajinasikan pada saat itu.

Integrasi persamaan hak dan persatuan selanjutnya diucapkan oleh Siti Sundari dalam Kongres Perempuan 22 Desember 1928: "Tugas perempuan dalam membangun kebangsaan adalah menjadi guru yang mendidik anak-anaknya (dalam arti biologis dan sosial) untuk menjadi bangsa yang maju" (Blackburn 2007, h. 67). Itu artinya kebangsaan juga mempunyai dimensi kultural, yaitu menciptakan habitus kebangsaan yang praktiknya harus dijalankan sehari-hari.

Setelah Indonesia merdeka, apa yang disebut kongres pemuda tampaknya tak lagi terpusat, melainkan terfraksi berdasarkan partai politik, sektor dan golongan. Kita belum sanggup mengumpulkan percakapan-percakapan dalam pelbagai kongres-kongres untuk menyimak apakah integrasi ide persamaan hak atau kesetaraan gender itu masuk ke dalam agenda kongres. Sebagai contoh, dalam kongres Barisan Buruh Indonesia pada 1946 (setelah Indonesia Merdeka) ide tentang keadilan bagi buruh perempuan masuk ke dalam agenda kongres. Ide itu sangat kuat didesakkan oleh S.K. Trimurti sebagai intelektual, aktivis buruh dan aktivis perempuan pada masa itu (Soebagijo 1982). Sayang sekali kita belum menemukan arsip sidang-sidang BPUPKI yang membahas integrasi kepentingan perempuan dan kebangsaan, sidang pembahasan UUD Sementara Republik Indonesia (populer disebut UUDS 1950), hingga sidang-sidang kenegaraan di masa Orde Baru dan reformasi.

### Adakah Kepentingan Perempuan Terhadap Kebangsaan?

Apakah perempuan mempunyai kepentingan yang "independen" terhadap kebangsaan? Meskipun istilah "independen" sesungguhnya tidak pernah murni, melainkan tetap memiliki interseksi dengan faktor-faktor kepentingan lainnya. Namun, coba kita pelajari kepentingan perempuan yang "independen" adalah yang berkaitan dengan kekhasan dirinya.

Tiga bulan setelah Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Perempuan pada 22 Desember 1928 atas prakarsa Suyatin (sebelum mendirikan Perwari adalah aktivis sayap perempuan Boedi Oetomo), Nyonya Soekonto, Nyi Hajar Dewantoro. Sejauh fakta yang kami himpun, pemrakarsa Kongres Perempuan itu tidak hadir

(atau tidak diundang?) dalam Kongres Pemuda 1926 maupun Sumpah Pemuda 1928. Hanya Siti Sundari yang pernah hadir di Kongres Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Perempuan ini Siti Sundari telah berpidato menggunakan bahasa Melayu, dan bukan bahasa Belanda sebagaimana dalam Kongres Sumpah Pemuda (Foulcher 2000; Blackburn 2007).

Cora Vreede de Stuers (2008) menilai Kongres Perempuan yang pertama dan selanjutnya menghindari percakapan yang sensitif, yaitu tentang politik melawan pemerintah kolonial dan tentang poligami. Maka keputusan Kongres Perempuan pertama itu membatasi pada persoalan perkawinan dan pendidikan perempuan, sebagai dua keputusan kongres yang kemudian diajukan sebagai tuntutan kepada pemerintah kolonial. Tuntutan Kongres Perempuan meminta pemerintah kolonial untuk memperbanyak sekolah perempuan, membuat kebijakan untuk menyantuni janda dan anak yatim, serta memberikan penjelasan tentang *sighat ta'lik*<sup>8</sup> kepada calon pengantin perempuan. Masalah-masalah politik Indonesia merdeka tidak dibicarakan, barangkali delegasi perempuan memilih cara taktis agar kepentingan perempuan dapat menjadi kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Dua kepentingan perempuan yang dinilai mendasar adalah tentang pendidikan dan perkawinan.

Dari 15 makalah pidato pada Kongres Perempuan I, hanya Siti Sundari dan Tien Sastrowirjo yang menyinggung perempuan dan kemerdekaan Indonesia. Adapun makalah lainnya sebagian besar menitikberatkan pada kepentingan perempuan untuk mengubah kedudukannya dalam perkawinan dan perceraian, mempunyai akses terbuka terhadap pendidikan, hak janda dan anak yatim-piatu. Kiranya itulah "independensi" kepentingan perempuan, atau ranah politik perempuan pada masa itu (Blackburn 2007).

Dalam catatan de Stuers (2008) pada 1952 kelompok perempuan berjuang keras untuk memasukkan klausula tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam pernikahan ke dalam pembahasan UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Kelompok perempuan itu mempunyai basis legitimasi pada pasal persamaan hak yang dijamin dalam Deklarasi Umum HAM (DUHAM) yang dikeluarkan oleh PBB dan Indonesia telah menjadi anggotanya. Persoalannya bahwa UUDS 1950 tidak dapat dirampungkan, maka pada 1959 Sukarno mengeluarkan dekret untuk kembali menggunakan UUD 1945—yang di dalamnya ide persamaan hak perempuan tidak tersurat.

Dalam Kongres Perempuan II, Suwarni Djojoseputro dari organisasi *Isteri Sedar*—mengangkat masalah poligami dan hal ini menimbulkan polemik di kalangan

pendukung politik Islam. Pada umumnya panitia kongres ingin menghindari masalah yang dinilai akan menyinggung perasaan delegasi dari organisasi Islam (de Stuers 2008). Rupanya poligami sejak masa itu hingga pascareformasi saat ini selalu menimbulkan polemik, tidak saja dengan kaum laki-laki, tetapi justru dengan sesama perempuan. Perdebatan propoligami versus antipoligami pada mulanya seperti mencerminkan antara pandangan kaum nasionalis versus agama dalam tubuh kebangsaan. Meskipun dalam praktiknya poligami juga dilakukan oleh kalangan nasionalis sekuler. Tindakan Sukarno—sebagai pengusung nasionalis sekuler—yang menikah lagi pada 1952 memicu protes keras dari organisasi perempuan (de Stuers 2008).

Sepanjang dekade 1950-an, isu poligami menjadi perdebatan yang alot dalam pembahasan rancangan undang-undang perkawinan di parlemen. UU Perkawinan yang disahkan pada 1974 (masa Orde Baru) dan PP No 9 Tahun 1975 masih bersikap ambigu terhadap poligami<sup>9</sup>. Anehnya, dalam masa pascareformasi, kampanye tentang poligami sangat gencar dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pendukung radikalisme-fundamentalisme Islam. Bahkan poligami telah menjadi praktik terbuka yang dijalankan oleh politisi negara. Kelompok perempuan pendukung poligami cukup gencar dalam melawan kampanye antipoligami, perkawinan anak dan LGBT yang diperjuangkan para feminis.

Kongres Perempuan prakemerdekaan itu kemudian berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang di dalamnya penuh dengan kemajemukan organisasi perempuan. Akan tetapi KOWANI pada masa Orde Baru tidak lagi majemuk, melainkan dikendalikan oleh organisasi korporatis negara yaitu Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Sejak 1980-an KOWANI mendapat perlawanan dari gerakan perempuan yang mengampanyekan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh Indonesia (Rahayu 1996). Aktivis gerakan perempuan ini kemudian menggelar Kongres Perempuan pada awal reformasi, 22 Desember 1998 di Yogyakarta. Kongres itu mengamanatkan *affirmative action* untuk kuota 30 persen perempuan dalam politik formal dan perjuangan melawan berbagai bentuk diskriminasi perempuan dan kekerasan seksual.

Kepentingan perempuan yang kontemporer (yang belum ada sebagai tuntutan dalam Kongres Perempuan 1928) adalah tentang kekerasan terhadap perempuan yang menasar pada seksualitas dan tubuh perempuan juga tentang identitas seks yang tidak tunggal (LGBTQ). Isu ini menjadi pertarungan antara kelompok feminis dengan kelompok perempuan Islam-radikal-

fundamenalis atas nama moralitas tubuh perempuan. Pertarungan itu terjadi di ranah relasi antarwarga (*citizenship*) dalam praktik hidup sehari-hari dan juga di ranah politik formal (politik negara).

### Perempuan Melampaui Kebangsaan

Dengan mempelajari pandangan dan langkah politik perempuan sepanjang perjalanan kebangsaan, relasi perempuan dan kebangsaan berada di dua ranah. *Pertama*, kebangsaan di ranah penyelenggaraan negara untuk menjamin kepentingan perempuan dapat maju bersama dengan laki-laki, yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundangan atau kebijakan lainnya. Artinya relasi perempuan dan negara. *Kedua*, kebangsaan dalam arti membangun habitus kewargaan<sup>10</sup> di ranah sosiokultural, yang merupakan relasi antarwarga dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Kedua ranah tersebut disebut Lister (2003) dengan istilah *citizenship*.

Selama ini percakapan kebangsaan telah didominasi oleh studi politik hingga relasi perempuan dan kebangsaan berwujud kebijakan politik (mobilisasi ke dalam politik kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan negara) dan hukum di satu sisi, dan tuntutan politik organisasi perempuan untuk kepentingan perempuannya di lain sisi. Percakapan kita tentang perempuan dan kebangsaan juga lebih didominasi oleh kerangka studi politik. Sementara makin jauh dari perang kemerdekaan 1945-1949, kesadaran terhadap kebangsaan mulai memudar. Akan tetapi benarkah kesadaran terhadap kebangsaan itu memudar? Atau pengertian tentang kebangsaan itu yang harus dikeluarkan dari dominasi ilmu politik?

Ery Seda memberikan kritik terhadap percakapan kebangsaan yang melupakan peristiwa sehari-hari di ranah kewargaan, yaitu peranan perempuan mereproduksi bangsa atau kewargaan (*citizenship*) itu sendiri, dan hal ini merupakan peristiwa sehari-hari yang sering kali luput dalam penilaian kita. Akan tetapi kebangsaan memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu inklusif, toleran dan transformatif dan hal ini bisa diwujudkan dengan gerakan antarwarga yang saling membangun rasa tersebut. Percakapan tentang usaha membangun warga yang inklusif, toleran dan transformatif itu muncul sebagai percakapan feminis yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang Mei 2018. Dalam percakapan ini muncul kegelisahan bersama terhadap ide-ide konservatif yang setelah 20 reformasi ini berkembang subur dan menjadi ancaman

bagi pekerjaan perempuan untuk membangun warga yang inklusif dan toleran.

Ketika di media elektronik, digital dan cetak menampilkan *talk show* dan wawancara tentang “20 Tahun Reformasi”, seluruh narasumber dalam acara itu adalah laki-laki yang dipandang sebagai aktor reformasi. Rata-rata isi percakapan aktor laki-laki reformasi itu adalah tentang pergantian kekuasaan, dan tak satu pun membahas tentang perempuan-perempuan yang menjadi korban untuk pergantian kekuasaan itu. Akan tetapi yang dicemaskan dalam percakapan feminis bukan hanya itu, lebih jauh lagi bahwa aktor laki-laki itu tak ada yang menggelisahkan tumbuhnya konservatisme dalam bentuk intoleransi dan gerakan kemurnian (purifikasi) agama di ranah relasi kewargaan.

Ada hal-hal yang penting dalam percakapan feminis di Komnas Perempuan itu. *Pertama*, adalah tentang aktivitas perempuan di kampung-kampung untuk mengurus kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan anak. Kegiatan ini berkorelasi dengan pendidikan kritis (literasi), peningkatan ekonomi perempuan melalui berbagai modus dan mengurus sebuah organisasi. Perempuan itu membangun kampung, menggerakkan warga perempuan untuk aktif dan kritis, mengurus tetangga mereka yang mengalami kesulitan, bergotong royong untuk mengatasi bencana desa, mempercakapkan tentang hasil pertanian dan pasar, mempercakapkan tentang sekolah anak, dan lainnya.

Cerita lain dari tim Kalyanamitra yang beberapa tahun belakangan ini mengurus perempuan yang aktif di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tanpa Posyandu, program negara untuk kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak berarti apa-apa. Institusi negara selalu meminta data mikro kepada aktivis Posyandu dan juga memobilisasi mereka untuk aneka program departemen. Akan tetapi, sesungguhnya tidak ada alokasi anggaran untuk Posyandu, namun para perempuan itu melakukannya dengan sukarela.<sup>11</sup>

*Kedua*, diskursus tindakan afirmatif untuk kuota 30 persen perempuan dalam pemilu telah sampai ke dalam pengetahuan perempuan di kampung-kampung. Akan tetapi antara caleg perempuan (dan anggota legislatif perempuan) dan aktivitas perempuan di kampung dalam membangun kohesivitas warga itu masih berjarak. Perempuan di kampung selalu dimobilisasi ke dalam pemilu, tetapi para kandidat (ataupun setelah mereka terpilih sebagai anggota legislatif) tidak mengerti peranan perempuan dalam mereproduksi warga masyarakat, sehingga produk kebijakan (regulasi dan anggaran) yang dibuat anggota legislatif untuk menjamin kepentingan



perempuan bisa dihitung dengan jari. Setelah 20 Tahun Reformasi, tindakan afirmatif dalam politik pemilu itu belum sesuai dengan aspirasi gerakan perempuan, tetapi diskursus perempuan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan kepala daerah telah mendorong perempuan dari oligarki politik untuk berkontestasi.

*Ketiga*, produksi tulisan untuk menarasikan perempuan dalam gerakan reformasi dan mengisi reformasi masih sangat sedikit, justru karena padatnya aktivitas perempuan dalam mereproduksi kewargaan. Dalam hal ini perempuan melakukan kerja ganda antara mencari nafkah dan mengurus keluarga dan warga tetangganya. Narasi reformasi terlalu banyak yang tidak sampai pada telinga generasi muda, hal itu menyebabkan adanya ketidakpahaman anak muda terhadap perjuangan yang pernah dilakukan oleh gerakan perempuan pada masa sebelumnya hingga reformasi. Adanya kesenjangan antara generasi muda dan tua memunculkan ide bahwa pertukaran ilmu tentang kebangsaan yang komprehensif untuk keduanya perlu dilakukan. Dalam 20 tahun reformasi saat ini semua kelompok punya agenda masing-masing tentang reformasi, tetapi tidak ada satu benang merah yang menyatukan keinginan masing-masing dari mereka. Perlu ada gerakan solid untuk bisa menyampaikan informasi kepada generasi muda maupun dalam rangka menyatukan aspirasi.

Akan tetapi relasi perempuan dan kebangsaan selama 20 Tahun Reformasi untuk membangun kohesivitas warga kampung itu masih dipandang liyan (*the others*) dari negerinya sendiri. Meskipun yang liyan ini selalu dimanfaatkan untuk mobilisasi politik guna pergantian kekuasaan. Sementara, fakta di kampung-kampung, kaum perempuan itu tetap saling tolong menolong sesama perempuan dan anak, sekalipun suami mereka berbeda pendapat secara politik dan ideologi. Sebuah cerita pernah disampaikan oleh Ibu Oemini (1997, wawancara) aktivis Perwari<sup>12</sup> dari Bojonegoro dekade 1950-an, bahwa sekalipun di “pusat” antar organisasi perempuan saling adu pendapat karena politik dan ideologi, namun di desa-desa, “Kami bahu-membahu tanpa memikirkan darimana kami (organisasi perempuan—penulis) untuk membantu warga yang terkena bencana banjir Bengawan Solo (di Bojonegoro).” Bahkan menurut cerita Olin Monteiro, di daerah konflik, para perempuan yang terlebih dahulu bangkit untuk membangun kehidupan yang retak, tanpa diperintah oleh aparatus pemerintahan negara. Negara seperti tidak pernah hadir di daerah konflik, tetapi para perempuan itu hadir membangun kembali keluarga dan komunitasnya.

## Penutup

Kembali pada pertanyaan Woolf pada pembukaan tulisan ini: *What does our country mean to me, an outsider?* Jika perempuan lebih banyak menjadi alat mobilisasi kepentingan kebangsaan atau atas nama kebangsaan, maka apa artinya kebangsaan bagi perempuan? Seluruh percakapan feminis pada saat ini—juga menyelami sejarah, tampak secara konsisten perempuan selalu menjadi alat mobilisasi kebangsaan, meskipun perempuan itu sendiri memiliki kepentingan yang “independen” terhadap kebangsaan tetapi kepentingan itu dipandang “marginal” oleh aktor-aktor politik yang mengelola negara. Bahkan dalam percakapan itu juga menunjukkan adanya ideologi gender yang konsisten lintas waktu dan lintas ideologi—baik nasionalis maupun agama—bahwa perempuan adalah pusat moralitas yang “suci” sekaligus “kotor” (*evil*) dan karena itu harus dikendalikan oleh disiplin sekuler maupun berdasarkan norma agama.

Selama ini studi kita tentang kebangsaan terlalu didominasi oleh ilmu politik (yang maskulin), sehingga pemahaman tentang kebangsaan selalu mengarah pada aktivitas politik perempuan di ranah kekuasaan negara. Aktivitas politik perempuan itu memperjuangkan adanya kebijakan negara yang adil gender terhadap perempuan. Perjuangan untuk kebijakan itu telah dilakukan sejak masa pemerintah kolonial sampai Indonesia merdeka, dan hasilnya terlalu kecil bahkan untuk mengubah aspek persamaan hak dalam undang-undang. Akan tetapi, jika menggunakan perspektif feminis yang melakukan interkoneksi berbagai pendekatan ilmu-ilmu sosial, kita menemukan aktivitas produktif perempuan dalam membangun masyarakat warga. Di situ kaum perempuan mereproduksi kebangsaan secara terus-menerus tanpa kehadiran maupun di dukung oleh negara. Sayang sekali bahwa aktivitas mereproduksi masyarakat warga ini belum dipandang sepenuhnya sebagai aktivitas membangun kebangsaan. Untuk itu melalui percakapan ini kita dapat menegaskan bahwa kebangsaan menurut perempuan adalah berjuang dan berkembang menjadi warga dan warganegara (*citizenship*) dan bukan pertarungan untuk memperoleh kekuasaan politik demi menguasai negara.

## Daftar Pustaka

- Blackburn, S 2007, *Kongres Perempuan Indonesia: Tinjauan Ulang*, Yayasan Buku Obor & KITLV, Jakarta.
- De Stuers, CV 2008, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaiannya*, terj. E Rosa, P Ayuningtyas & D Istiani, Penerbit Komunitas Bambu, Jakarta.

Dinkelaker, S 2016, "The transformation of gender roles among transnational migrant care workers from rural Indonesia", paper dipresentasikan pada The 5<sup>th</sup> Southeast Asian Studies Symposium, 14-16 April, The Mathematical Institute, University of Oxford.

Dobbin, C 1980, "The Search for Women in Indonesian History", dalam AT Zainu'ddin (ed.), *Kartini Centenary: Indonesian Women Then and Now*, Centre of Southeast Asian Studies Australian Indonesian Association of Victoria, Monash University, Clayton.

Foulcher, K 2000, *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Pencapaian Simbol Kebangsaan Indonesia*, Penerbit Komunitas Bambu, Jakarta.

Harding, S (ed.) 2004, *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual & Political Controversies*, Routledge, London & New York.

Janti, N 2017, "Perempuan dalam Kongres Pemuda", *Majalah Historia*, 28 Oktober, dilihat 21 Juli 2018, <https://historia.id/modern/articles/perempuan-dalam-kongres-pemuda-6l7R1>

Lister, R 2003, *Citizenship: Feminist Perspectives*, Palgrave Macmillan, New York.

Pane, A 1922, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Balai Pustaka, Jakarta.

*Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia 1978*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soebagijo, IN 1982, S. K. Trimurti: *Wanita Pengabdian Bangsa*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

Surjomihardjo, A 1981, *Laporan Kongres Pemuda Indonesia Pertama*, Penerbit CV Takari, Jakarta.

Sukarno 1963, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta

Rahayu, RI 1996, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an", dalam L Hadiz (ed.), *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel PRISMA*, LP3ES, Jakarta, hh. 421-449.

Van Miert, H 2003, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda Indonesia, 1918-1930*, Hasta Mitra & Pustaka Utan Kayu, Jakarta.

West, L 2013, *Feminist Nationalism*, Routledge, New York.

## Catatan Akhir

- 1 Metode Titik Pijak (*Standpoint Theory*) dipopulerkan oleh Sandra Harding untuk melawan argumen tentang objektivitas dalam penelitian sosial, mengingat objektivitas itu mengandung *male-view* hingga penarikan kesimpulan terhadap realitas sosial menjadi bias laki-laki. Untuk itu Harding memperkenalkan *strong objectivity* (objektivitas kuat) yang berpijak pada kondisi khusus perempuan yang secara sosial disituasikan marginal. Oleh karena disituasikan marginal, maka pengetahuan perempuan tak terbaca dalam laporan-laporan penelitian sosial.
- 2 Untuk mengungkap pengetahuan perempuan, Harding dan penganut teori *Standpoint* lainnya menggunakan pengalaman perempuan sebagai ladang epistemik. Artinya di dalam pengalaman perempuan tersimpan pengetahuan yang tersembunyi dan tak terbaca oleh metodologi penelitian sosial yang *male-view*.
- 3 Pertemuan aktivis feminis dalam rangka refleksi "20 Tahun Reformasi" pada 11 Mei 2018 di Komnas Perempuan.
- 4 Menurut Musdah Mulia, Islam di Indonesia saat ini terbagi dalam tiga kelompok yaitu Islam Moderat (Islam moderat tetap memperlakukan perempuan secara patriarkis), Islam Liberal Progresif (kelompok ini pendukungnya sedikit, sebab istilah liberal dianggap kotor oleh sebagian kalangan umat Islam), dan Islam Radikal-Fundamentalis (yang menguat dalam generasi milenial, 1 dari 3 orang pendukung mereka percaya bahwa *jihad* adalah membunuh orang nonIslam, dan pandangan Islam yang ini tidak menghendaki pluralisme).
- 5 Samia Dinkelaker, dari Freie Universität Berlin, Jerman, telah membuat penelitian tentang buruh migran yang dikirim ke Hong Kong, sejak sebelum berangkat sampai dengan di negara tujuan. Ia mencatat materi-materi yang diberikan kepada buruh migran sebelum keberangkatan.
- 6 Disampaikan untuk menyambut Kongres Perempuan I, 22 Desember 1928 dalam artikel berjudul "Kongres Kaum Ibu" di surat kabar *Suluh Indonesia Muda*.
- 7 Disampaikan dalam pidato di depan Kongres Luar Biasa KOWANI pada 1 Juni 1966. Lihat notulen KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- 8 *Sighat ta'lik* adalah janji mempelai laki-laki yang diucapkan di depan mempelai perempuan, keluarga, penghulu, saksi, dan hadirin. Janji itu tertulis dan ditandatangani oleh mempelai laki-laki setelah pengucapan janji tersebut.
- 9 PNS boleh beristri lebih dari satu dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur dalam PP no. 10/1983 jo PP no. 45/1990. PNS wanita tak boleh jadi istri kedua/ketiga/keempat dan bagi PNS wanita yang melanggar akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan PP no. 45 tahun 1990 pasal 15.
- 10 Terdapat perdebatan dalam memaknai *citizenship*, yaitu yang berpendapat bahwa *citizenship* adalah warga yang tercatat dan memiliki identitas dalam sebuah negara (relasi warga dan negara). Akan tetapi ada pula pendapat lain bahwa *citizenship* adalah warga komunitas yang boleh tak terikat oleh identitas negara, yang lebih menekankan pada relasi antarwarga. Dalam bahasa Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan relasi warga dan negara disebut kewarganegaraan, sedangkan relasi antarwarga disebut kewargaan. Lister menawarkan cara pandang feminis terhadap *citizenship*, yaitu segala daya perjuangan perempuan untuk menjadi warga dan warga negara. Untuk itu, dalam pembahasan ini kami memaknai *citizenship* dalam artian kewargaan dan kewarganegaraan.
- 11 Percakapan di Jambore Posyandu Nasional 3-4 April 2018 di Bumi Perkemahan Cibubur, yang dikoordinasi oleh Kalyanamitra.
- 12 Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Oemini pada tahun 1997.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
3. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Soe Tjen Marching, Ph.D. (SOAS University of London)
6. Dr. Atnike Nova Sigiro (Universitas Paramadina)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marginal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pimpinan Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.



YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

